



RENCANA KERJA TAHUN 2023

R E N J A

**DINAS PERIKANAN
KOTA KENDARI
2022**



RENCANA KERJA TAHUN 2023

R E N J A

**DINAS PERIKANAN
KOTA KENDARI
2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023" dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023 - 2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Kendari serta Target dan Sasaran Pembangunan Perikanan yang dilaksanakan melalui SKPD Dinas Perikanan Kota Kendari, serta sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance*.

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Dinas Perikanan Kota Kendari.

Dengan disusunnya RENJA ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat sebagai bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Kendari, September 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA KENDARI,





DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU | 6 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD | 6 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 25 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 26 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 27 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 47 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 48 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 48 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 50 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 55 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 71 |
| BAB V PENUTUP | 73 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Kendari adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan perikanan di Kota Kendari sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2023.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan ini mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan perikanan di Kota Kendari sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPD Kota Kendari dan Renstra Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023 – 2026.

Renja Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja Tahun ke 1 (pertama) pemerintahan transisi untuk Periode masa pemerintahan tahun 2023 hingga akhir masa RPD 2026 ke depan, sehingga keberhasilan pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 ini sangat menentukan kinerja SKPD tahun yang akan datang.

Permasalahan yang mendasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan perikanan adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah serta kewenangan Dinas Perikanan Kota Kendari. Di lain pihak dengan melihat karakteristik pelaku usaha perikanan di Kota Kendari yang Sebagian besar adalah nelayan tradisional dan pembudidaya kecil, maka kebijakan dan program yang disusun harus mampu menjadi pelindung bagi nelayan tradisional dan pembudidaya kecil tersebut dan memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi para nelayan dan pembudidaya yang berkeinginan untuk maju dan berkembang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam memotivasi dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan fasilitasi dan regulasi dari pemerintah yang terintegrasi dan berkesinambungan namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999.



Begitu kompleksnya berbagai permasalahan yang di hadapi dan terbatasnya sumber daya serta tidak terprediksikan berbagai faktor luar yang menjadi penghambat pembangunan perikanan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Pembangunan di bidang perikanan yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai tantangan agar mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dalam menunjang pencapaian target dan sasaran pembangunan perikanan Kota Kendari.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut RENJA SKPD, disusun oleh Dinas Perikanan Kota Kendari berdasarkan RPD Pemerintah Kota Kendari, RENSTRA serta RKPD Kota Kendari Tahun 2023.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023 yang dimuat dalam bentuk program dan kegiatan terdiri dari 5 (Lima) Program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengawasan Sumberdaya Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023 adalah :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



5. Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang - undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);



13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2023 – 2026;
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Kendari Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Kendari (Lembaran daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Kendari.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Kendari yaitu :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2023 dan mensinkronkan dengan program dan kegiatan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam rangka pembangunan daerah, khususnya bidang Perikanan
3. Menghasilkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Kendari Tahun 2023.



1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Kendari yaitu :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan perikanan antar wilayah dan tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kota)
2. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Penetapan Kinerja (TAPJA) merupakan tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja (RENJA), dengan demikian penetapan rencana kerja dibuat untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui tindakan yang terukur serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Evaluasi Capaian Kinerja digunakan untuk melihat pencapaian sasaran dan target dari penetapan kinerja Dinas Perikanan serta hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, dengan maksud untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 – Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Kendari dan
Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kota Kendari s.d. Tahun 2022
Kota Kendari

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan | |
|---------|---|---|--|--|---|-------------------|---|---|--|
| | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(6/5) | 8 | 9=(6+8) | 10=(9/4) |
| 3.25 | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | |
| 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|----|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-------|---|---------|---|---------|
| 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja OPD | 24 | 11 Dkumen dan 13 Laporan Kegiatan | 5 | 4 Dokumen dan 1 Laporan | 5 | 4 Dokumen dan 1 Laporan | 100 % | 4 | Dokumen | 4 | Dokumen |
| 3.25.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 | Dokumen | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100 % | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen |
| 3.25.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen RKA | | | | | | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen |
| 3.25.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen RKA-P | | | | | | | | | |
| 3.25.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 | 3 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen DPA | | | | | | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----|--|----|-------------------------|----|-------------------------|-------|-----------|-----------|
| 3.25.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 | 3 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen DPA-P | | | | | | | |
| 3.25.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan, dan 1 Dokumen LAKIP | 4 | 1 Laporan dan 3 Dokumen | 4 | 1 Laporan dan 3 Dokumen | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 3.25.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja | | | | | | | |
| 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Tahun | 6 | Laporan | 6 | Laporan | 100 % | 7 Dokumen | 7 Dokumen |
| 3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | Bulan | 64 | Orang | 64 | Orang | 100 % | 14 Bulan | 14 Bulan |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----|------------------------------|---|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 3.25.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 3 | Dokumen | | | | | | | | | | |
| 3.25.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | Laporan Kegiatan | | | | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | | | |
| 3.25.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 13 | Laporan | 6 | Laporan | 6 | Laporan | 100 | % | 6 | Dokumen | 6 | Dokumen |
| 3.25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 4 | 2 Dokmen, 2 Laporan | | | | | | | | | | |
| 3.25.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Dokumen | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| 3.25.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Laporan | | | | | | |
| 3.25.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | Laporan | | | | | | |
| 3.25.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 1 | Tahun | | | | | | |
| 3.25.01.2.04.01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 | Dokumen | | | | | | |
| 3.25.01.2.04.02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 | Dokumen | | | | | | |
| 3.25.01.2.04.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 | Laporan | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----|---------|--|--|--|-----|---|-----|---|
| 3.25.01.2.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 | Laporan | | | | | | | |
| 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianyanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 | Tahun | | | | 100 | % | 100 | % |
| 3.25.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 | Unit | | | | | | | |
| 3.25.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 54 | Paket | | | | | | | |
| 3.25.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolaha Administrasi Kepegawaian | 2 | Dokumen | | | | | | | |
| 3.25.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4 | Orang | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------|---------|---------|-------|-------|----------|----------|--|
| 3.25.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 11 Orang | | | | | 8 Orang | 8 Orang | |
| 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 80 % | | |
| 3.25.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3 Paket | | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | |
| 3.25.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100 % | | 12 Bulan | 12 Bulan | |
| 3.25.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Paket | | | | | 12 Bulan | 0 Bulan | |
| 3.25.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 1 Paket | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----|---------|----|---------|----|---------|-----|---|-----|-------|-----|-------|
| 3.25.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 | Laporan | 4 | Laporan | 4 | Laporan | 100 | % | 12 | Bulan | 12 | Bulan |
| 3.25.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 74 | Laporan | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100 | % | 60 | Orang | 60 | Orang |
| 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 17 | Unit | 9 | Unit | 9 | Unit | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
| 3.25.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 | Unit | | | | | | | 6 | Unit | 6 | Unit |
| 3.25.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 | Unit | 6 | Unit | 6 | Unit | 100 | % | 12 | Unit | 12 | Unit |
| 3.25.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 | Unit | 3 | Unit | 3 | Unit | 100 | % | 4 | Paket | 4 | Paket |



| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|--|
| 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 3.25.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | |
| 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Aset/Barang Milik Daerah | 71 Unit | 28 Unit | 28 Unit | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 3.25.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31 Unit | 16 Unit | 16 Unit | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | |
| 3.25.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23 Unit | 8 Unit | 8 Unit | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | |
| 3.25.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | |



| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|--|
| 3.25.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 13 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Tercapainya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 35.000 Ton | 5 % | 5 % | 100 % | 100 % | 67 % | |
| 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | 11,37 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 3.25.03.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| 3.25.03.2.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap | 1.769 Unit | 30 Unit | 30 Unit | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | |



| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------|----------|----------|-------|----------|----------|--|
| 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Cakupan Binaan kelompok Nelayan | 7 % | 20 % | 20 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil | 200 Orang | 60 Orang | 60 Orang | 100 % | 50 Orang | 50 Orang | |
| 3.25.03.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 12 Klompok | | | | 3 KUB | 3 KUB | |
| 3.25.03.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha | 10 Unit Usaha | | | | | | |
| 3.25.02.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 2 Layanan | | | | 100 % | 0 % | |
| 3.25.03.2.03.02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 2 Layanan | | | | 2 TPI | 2 TPI | |



| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----|-----|-------|------------|-----------|--|
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Tercapainya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 2.500 Ton | 4 % | 4 % | 100 % | | | |
| 3.25.04.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Perizinan Bidang Perikanan Budidaya | 1 Tahun | | | | 100 % | 0 % | |
| 3.25.04.2.01.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 1 SOP | | | | 50 Dokumen | 0 Dokumen | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----|--------------------|---|----------|---|----------|---------|---|---------|-----|----|-----|
| 3.25.04.2.01.02 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis | 5 | Izin / Rekomendasi | | | | 50 | Dokumen | 0 | Dokumen | | | |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 42 | Klompok | 8 | Kelompok | 8 | Kelompok | 100 | % | 100 | % | 50 | % |
| 3.25.04.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 27 | Klompok | 8 | Kelompok | 8 | Kelompok | 100 | % | 5 | KUB | 5 | KUB |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|----------|----------|--------------|------------|----------|
| 3.25.04.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 5 | Klompok | | | | 5 | KUB | 0 | KUB | | | |
| 3.25.04.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 5 | Klompok | | | | | | | | | | |
| 3.25.04.2.02.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5 | Klompok | | | | | | | | | | |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Meningkatnya Produksi Hasil Budidaya Perikanan | 1 | Tahun | 5 | Unit | 5 | Unit | 100 | % | 5 | Paket | 100 | % |
| 3.25.04.2.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | | | | | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | | |



| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 17 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 100 % | 5 Paket | 5 Paket | |
| 3.25.04.2.04.06 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | 1 Ha | 2 Ha | 2 Ha | 100 % | 1 Dokumen | 0 Dokumen | |
| 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah Jenis Usaha Bidang Perikanan Yang Diawasi | 3 Jenis Usaha | | | | | | |
| 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Kabupaten/Kota | 4 Dkumen | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|
| 3.25.05.2.01.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen | | | | | | | | | | |
| 3.25.05.2.01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota | 2 | Dokumen | | | | | | | | | | |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Jumlah Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan skala mikro dan kecil yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitas | 5 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 67 | % |
| 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Tersedianya Dukumen Daftar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 | Dokumen | | | | | 100 | % | 0 | % | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------|-----------|-----------|--|
| 3.25.06.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 Dokumen | | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | |
| 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Meningkatnya Daya Saing Produk Hasil usaha Pengolahan dan Usaha Pemasaran Skala mikro dan kecil | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Terbinanya Pelaku Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 100 % | 11 KUB | 11 KUB | | |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya serta Tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan guna peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat | 52 % | 15.000 Ton | 15.000 Ton | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 3.25.06.2.03.01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 500 Ton | 15.000 Ton | 15.000 Ton | 100 % | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--------------|---|--------------|---|--------------|-------|---|-----|---|-----|
| 3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7 | Pelaku Usaha | 3 | Pelaku Usaha | 3 | Pelaku Usaha | 100 % | 3 | KUB | 3 | KUB |
|-----------------|--|--|---|--------------|---|--------------|---|--------------|-------|---|-----|---|-----|



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Kendari sesuai RENSTRA disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Kendari

| No | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Renstra Dinas Perikanan | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|-------------|------------|--------------------------------|--------|--------|-------|-------------------|-------|----------|--------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Tercapainya Target Produksi Perikanan (Ton) | | | 51 | 53 | 37,5 | 41,28 | 31,25 | 0 | 120,08 | 126,09 | |
| 2 | Jumlah Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun) | | | 55 | 55 | 55 | 5 | 31,25 | 78 | 79,2 | 81 | |
| 3 | Cakupan Binaan Kelompok Nelayan (%) | | | 7 | 7 | 17 | 85,41 | 85,21 | 85,21 | 85,37 | 85,41 | |
| 4 | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton) | | | 22,500 | 22,500 | 24,700 | 53,45 | 51,08 | 53,25 | 53,35 | 53,45 | |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor Perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan, baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan hasil olahan. Oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Kendari, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan, baik dari segi penangkapan ikan dan budidaya perikanan maupun dari segi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
2. Maraknya aktifitas alih fungsi lahan potensial budidaya perikanan untuk kegiatan non perikanan.
3. Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat sektor perikanan baik melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengurangi tingkat kemiskinan
4. Belum semua nelayan mampu mengakses informasi dan menerapkan teknologi perikanan serta masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
5. Belum optimalnya kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan.

Adapun isu-isu strategis terkait dengan pembangunan Perikanan di Kota Kendari dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas kelembagaan bagi nelayan dan Pembudidaya ikan serta kurangnya akses informasi dan teknologi bagi nelayan dan pembudidaya ikan
2. Pemanfaatan lahan budidaya belum optimal serta Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan akibat alih fungsi lahan potensial budidaya.
3. Belum optimalnya produksi benih ikan unggul bagi BBI dan UPR serta masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan dalam usaha budidaya masyarakat.



4. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan.
5. Lemahnya distribusi pasar komoditas hasil perikanan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD merujuk pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Perikanan Kota Kendari

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|--|--------------|---|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|----------------|------------------------------------|-------------|
| Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 1 Tahun | | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 1 Tahun | 36.322.220.000 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kota Kendari | Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kota Kendari | Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 8.634.920.000 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja OPD | 24 | 11 Dokumen dan 13 Laporan Kegiatan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja OPD | 24 | 11 Dokumen dan 13 Laporan Kegiatan | 111.760.000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 | Dokumen | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 | Dokumen | 41.000.000 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen RKA | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen RKA | 10.340.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen RKA-P | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen RKA-P | 5.880.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 | 3 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen DPA | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 | 3 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen DPA | 11.840.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 | 3 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen DPA-P | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 | 3 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen DPA-P | 11.340.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen LAKIP | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen LAKIP | 11.840.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|--------------------------------|--|---|--|---|----------|--------------------------------|----------------------|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja | 19.520.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Tahun | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Tahun | 5.743.080.000 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | Tahun | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | Tahun | 5.700.000.000 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 3 | Dokumen | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 3 | Dokumen | 22.240.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | Laporan Kegiatan | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | Laporan Kegiatan | 7.840.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 13 | Laporan | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 13 | Laporan | 13.000.000 |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|--------------------------------|---|--|---|----------|--------------------------------|-------------------|
| | | steran SKPD | | | | | | | | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 | 2 Dokumen dan 2 Laporan | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4 | 2 Dokumen dan 2 Laporan | 18.560.000 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Dokumen | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Dokumen | 5.000.000 |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Dokumen | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Dokumen | 7.680.000 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | Laporan | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | Laporan | 5.880.000 |
| Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 1 | Tahun | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 1 | Tahun | 25.500.000 |
| Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 | Dokumen | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 | Dokumen | 6.000.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|--------------|--|---|--|---|----------|--------------|--------------------|
| Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 | Dokumen | | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 | Dokumen | 6.000.000 |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 | Laporan | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 | Laporan | 7.500.000 |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 | Laporan | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 | Laporan | 6.000.000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 | Tahun | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 | Tahun | 467.000.000 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 | Unit | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 | Unit | 6.000.000 |
| Penyediaan Sarpras Penunjang Disiplin Pegawai | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 | Unit | | Penyediaan Sarpras Penunjang Disiplin Pegawai | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 | Unit | 6.000.000 |



| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------|---|---|----------|--------------|--------------------|
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 54 | Paket | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 54 | Paket | 35.000.000 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 | Dokumen | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 | Dokumen | 14.000.000 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4 | Orang | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4 | Orang | 220.000.000 |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 54 | Orang | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 54 | Orang | 24.000.000 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 11 | Orang | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 11 | Orang | 165.000.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Tahun | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Tahun | 425.000.000 |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|--|--|---|---|-------|------------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3 | Paket | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3 | Paket | 16.000.000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Paket | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Paket | 5.000.000 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 1 | Paket | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 1 | Paket | 5.000.000 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 | Paket | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 | Paket | 20.000.000 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 1 | Paket | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 1 | Paket | 15.000.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 | Paket | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 | Paket | 8.000.000 |
| Penyediaan Bahan/Material | | Tersedianya Bahan/Material | 1 | Paket | | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 1 | Paket | 15.000.000 |



| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|---|--|-----------|-------------|----------------------|
| Fasilitas Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu | 4 | Laporan | Fasilitas Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu | 4 | Laporan | 8.000.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 74 | Laporan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 74 | Laporan | 330.000.000 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | Dokumen | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | Dokumen | 3.000.000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 17 | Unit | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 17 | Unit | 1.370.000.000 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 | Unit | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 | Unit | 870.000.000 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 | Unit | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 | Unit | 400.000.000 |
| Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | 2 | Unit | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | 2 | Unit | 16.000.000 |



| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 6 Unit | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 6 Unit | 68.000.000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 Unit | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 Unit | 16.000.000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 Unit | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 Unit | 0 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10 Laporan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10 Laporan | 41.550.000 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4.000.000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4 Laporan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4 Laporan | 33.350.000 |



| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|---|---|-----------|-------------|--------------------|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5 | Laporan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5 | Laporan | 97.800.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Aset/Barang Milik Daerah | 71 | Unit | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Aset/Barang Milik Daerah | 71 | Unit | 432.470.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31 | Unit | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31 | Unit | 300.470.000 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23 | Unit | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23 | Unit | 9.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3 | Unit | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3 | Unit | 99.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 13 | Unit | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 13 | Unit | 18.000.000 |



| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|------------|--|---|---------------|------------|----------------------|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Unit | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Unit | 6.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Tercapainya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 35.000 | Ton | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Tercapainya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 35.000 | Ton | 8.856.800.000 |
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | 11,37 | % | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | 11,37 | % | 8.600.000.000 |
| Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen | 10.000.000 |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 1.769 | Unit | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 1.769 | Unit | 8.590.000.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|----------------|--|--|--|---|----------|----------------|--------------------|
| Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | Persentase Cakupan Binaan kelompok Nelayan | 7 | % | | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | Persentase Cakupan Binaan kelompok Nelayan | 7 | % | 222.000.000 |
| Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil | 206 | Orang | | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil | 206 | Orang | 180.000.000 |
| Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 12 | Kelompok | | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 12 | Kelompok | 30.000.000 |
| Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha | 10 | Unit Usaha | | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha | 10 | Unit Usaha | 12.000.000 |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 2 | Layanan | | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 2 | Layanan | 34.800.000 |
| Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 2 | Layanan | | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 2 | Layanan | 34.800.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|--|---|--|--|--------------|--------------|----------------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | Tercapainya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 2.500 | Ton | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | Tercapainya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 2.500 | Ton | 6.370.000.000 |
| Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Terlaksananya Perizinan Bidang Perikanan Budidaya | 1 | Tahun | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Terlaksananya Perizinan Bidang Perikanan Budidaya | 1 | Tahun | 438.000.000 |
| Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 1 | SOP | | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 1 | SOP | 6.000.000 |



| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------|--|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis | 5 | Izin / Rekomendasi | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis | 5 | Izin / Rekomendasi | 4.000.000 |
| Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 42 | Kelompok | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 42 | Klompok | 156.000.000 |
| Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 27 | Kelompok | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 27 | Kelompok | 30.000.000 |
| Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 5 | Kelompok | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 5 | Kelompok | 4.000.000 |



| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|--|---|--|--|----------------|----------------------|
| Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 5 Unit Usaha | | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 5 Unit Usaha | 12.000.000 |
| Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5 Kelompok | | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5 Kelompok | 5.000.000 |
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | Meningkatnya Produksi Hasil Budidaya Perikanan | 1 Tahun | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | Meningkatnya Produksi Hasil Budidaya Perikanan | 1 Tahun | 5.776.000.000 |
| Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 5.000.000 |
| Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 17 Unit | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 17 Unit | 1.400.000.000 |



| | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|---|--|----------|--------------------|-------------------|
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10 | Unit | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10 | Unit | 500.000.000 |
| Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 3 | Sampel | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 3 | Sampel | 6.000.000 |
| Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat | 20 | Orang | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat | 20 | Orang | 15.000.000 |
| Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | 1 | Ha | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | 1 | Ha | 3.850.000.000 |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah Jenis Usaha Bidang Perikanan yang Diawasi | 3 | Jenis Usaha | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah Jenis Usaha Bidang Perikanan yang Diawasi | 3 | Jenis Usaha | 26.000.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|--|---|--|---|---|---------|----------------|
| Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Kabupaten/Kota | 4 | Dokumen | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Kabupaten/Kota | 4 | Dokumen | 26.000.000 |
| Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen | 14.000.000 |
| Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota | 2 | Dokumen | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota | 2 | Dokumen | 12.000.000 |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | Persentase Jumlah Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Pembinaan dan Fasilitas | 5 | % | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | Persentase Jumlah Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Pembinaan dan Fasilitas | 5 | % | 12.434.500.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-------------------|--|--|--|---|-----------|-------------------|-----------------------|
| Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | Tersedianya Dukumen Daftar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 | Dokumen | | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | Tersedianya Dukumen Daftar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 | Dokumen | 9.500.000 |
| Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Tersedianya Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 | Dokumen | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Tersedianya Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 | Dokumen | 9.500.000 |
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | Meningkatnya Daya Saing Produk Hasil usaha Pengolahan dan Usaha Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 10 | Unit Usaha | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | Meningkatnya Daya Saing Produk Hasil usaha Pengolahan dan Usaha Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 10 | Unit Usaha | 10.000.000 |
| Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | Terbinanya Pelaku Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 10 | Unit Usaha | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | Terbinanya Pelaku Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 10 | Unit Usaha | 10.000.000 |
| Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Tersedianya serta Tersalurkannya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan guna Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat | 52 | % | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Tersedianya serta Tersalurkannya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan guna Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat | 52 | % | 12.415.000.000 |



| | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------------|--|--|-----|--------------|----------------|
| Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 500 | Ton | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 500 | Ton | 12.375.000.000 |
| Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7 | Pelaku Usaha | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7 | Pelaku Usaha | 40.000.000 |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perangkat Daerah melakukan proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kota Kendari. Tahun 2023, Dinas Perikanan Kota Kendari tidak memiliki usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Kendari

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-------|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nihil | | | | | |

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan :

“MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL”

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 – 2026, maka dilakukan penyesuaian komponen yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan pengukuran kinerja melalui beberapa indikator kinerja utama yang pada akhirnya ditetapkan melalui Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Perikanan Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023 berpijak dari arah kebijakan dan strategi nasional dalam hal ini adalah Kementerian Perikanan (KKP) dan disejalkan dengan arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari yang mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan saat ini maupun dalam empat tahun mendatang. Untuk itu arah kebijakan umum pembangunan Dinas Perikanan 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain Pengembangan PPI/TPI Kendari, bantuan sarana dan armada penangkapan, Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar, peningkatan dan pengembangan usaha budidaya dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran.
2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP).
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan (*pro poor, pro job, pro growth dan pro sustainability*).
4. Meningkatkan kualitas SDM dan sumber daya perikanan.
5. Mengembangkan dan memperkuat industri, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Meningkatkan kinerja, manajerial, teknis SDM, peralatan kerja, pendataan, pelayanan, koordinasi dengan *stake holder*, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang perikanan secara cepat, transparan, mudah dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
7. Mendorong minat investasi perikanan serta kemitraan usaha antar pelaku usaha (*pro business*).

Sedangkan strategi pembangunan perikanan Kota Kendari dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut berlandaskan arah dan kebijakan umum adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, melalui pengembangan sarana armada dan alat tangkap perikanan, pelabuhan perikanan serta pengelolaan sumberdaya ikan.
2. Percepatan pengembangan perikanan budidaya, melalui peningkatan sarana prasarana budidaya laut, air payau, air tawar serta pembenihan.
3. Percepatan pengembangan pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, kelembagaan masyarakat perikanan melalui pengembangan sarana prasarana pengolahan, pemasaran, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan, pengendalian, pengujian serta penjaminan mutu hasil-hasil perikanan.

4. Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pelestarian sumberdaya perikanan melalui konservasi, program coremap, pengawasan dan penataan pemanfaatan potensi.
5. Peningkatan kualitas pelayanan, SDM aparatur dan masyarakat perikanan secara terintegrasi, melalui pendidikan, pelatihan dan magang serta peningkatan pelayanan administrasi, keuangan, perencanaan dan evaluasi.
6. Menjadikan rumput laut sebagai komoditi unggulan, melalui pembinaan pembudidayaan yang berkesinambungan.
7. Pengembangan sentra produksi perikanan terpadu, melalui pengembangan minapolitan.
8. Memperkuat akses pasar lokal, domestik dan internasional, melalui promosi dan kerjasama dengan komunitas bisnis dan masyarakat lingkup lokal, nasional dan internasional.
9. Penguatan jejaring kerja, melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi, baik lingkup Dinas Perikanan, Provinsi, Kementerian Perikanan, Pemerintah Pusat, lintas instansi/sector, dunia usaha, masyarakat dan lembaga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan dirancang secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya yang sejalan dengan RPJMN, RPJMD, dan RENSTRA serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Kendari. Tujuan dan sasaran merupakan penjelasan dari program prioritas serta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD Kota Kendari dan RENSTRA Dinas Perikanan 2023 – 2026 yang merupakan tanggung jawab Dinas Perikanan.

Melalui perumusan tujuan dan sasaran akan diperoleh pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkandung di dalam RPJMD Kota Kendari dan RENSTRA Dinas Perikanan Kota Kendari 2023 – 2026. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan harus dijabarkan secara detail sehingga akan diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terukur, spesifik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Pembangunan Perikanan sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 31 Tahun 2004 (UU No. 45 Tahun 2009) Tentang Perikanan Pasal 3 antara lain:

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan-kecil;
2. Meningkatkan penerimaan devisa negara;
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein hewani;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
8. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Berdasarkan Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2023 – 2026 maka telah ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kendari: **“MEWUJUDKAN KENDARI TAHUN 2025 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG BERTAQWA, MAJU, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA”**. Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Kendari dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Kendari. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan Pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kota Kendari dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi pemerintah kota kendari adalah peningkatan ketahanan pangan, sedangkan sasarnya adalah meningkatnya produktivitas sektor perikanan.

Tabel 3.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKP Kota Kendari**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke- | | | |
|----|------------------------------|--|--------------------------|---|--------|--------|--------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peningkatan Ketahanan Pangan | Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan | Produksi Perikanan (Ton) | 37.500 | 41.280 | 43.500 | 49.900 |

Guna mewujudkan Visi Pemerintah Kota Kendari maka Dinas Perikanan mengemban tanggung jawab pada misi pertama yakni meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dalam mencapai tujuan tersebut maka sasarnya adalah meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| VISI : MEWUJUDKAN KENDARI TAHUN 2025 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG BERTAQWA, MAJU, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA | | | |
|---|--|--|--|
| MISI : <ol style="list-style-type: none">1. Misi Lingkungan dengan mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Keseimbangan dan Keserasian Lingkungan Kota yang Indah, Sejuk, Sehat, dan Lestari;2. Misi Sosial Kemasyarakatan dengan mendukung perbaikan moral, akhlak dan disiplin serta penciptaan suasana kehidupan masyarakat kota yang aman, rukun, damai dan harmonis serta mendorong pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk semakin berperan dalam pembangunan kota;3. Misi Pelayanan melalui pengembangan sistem pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, cepat, transparan, terjangkau, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan4. Misi Perekonomian dengan mendorong pertumbuhan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi rakyat serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan investasi di daerah pola <i>Reinventing Government</i>;5. Misi Profesionalisme Aparat melalui pengembangan kualitas sumber daya aparat yang profesional, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam tugas dan pelayanan;6. Misi Pemerintahan yang Baik dengan menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, demokratis, berwibawa, dan bertanggungjawab. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Peningkatan Ketahanan Pangan | Meningkatkan Kemandirian Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan, serta meningkatkan Produktivitas Sektor Perikanan | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kapasitas SDM dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan2. Pengembangan infrastruktur perikanan dan intensifikasi usaha perikanan3. Peningkatan daya saing industri dan iptek perikanan4. Pengembangan kerjasama, kemitraan usaha, dan penataan regulasi | Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor perikanan serta meningkatkan kemandirian nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di sektor perikanan |

Adapun strategi OPD DKP Kota Kendari dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah melalui program peningkatan nilai tambah serta jangkauan dan akses pemasaran hasil-hasil perikanan yang didukung dengan kebijakan pemerintah melalui peningkatan sarana-dan prasarana perikanan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dan akses informasi yang cepat.

Sebagai implementasi dan penjabaran Misi Pemerintah Kota Kendari serta tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kendari Tahun 2023-2026 maka Dinas Perikanan menetapkan arah tujuan yang akan dicapai melalui :

1. Peningkatan kesejahteraan hidup dan kemandirian nelayan dan pembudidaya ikan.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil perikanan.
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan.
4. Peningkatan fungsi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan.
5. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan ekonomi sektor Perikanan dapat berlangsung secara berkesinambungan.
6. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
7. Peningkatan kompetensi, kualitas dan profesionalisme SDM Aparatur.
8. Pemberdayaan masyarakat secara efektif dalam mengelola potensi sumberdaya Perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai sasaran maka ada beberapa strategi yang dilaksanakan antara lain:

1. Pro – Poor:

Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar, serta masyarakat kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

2. Pro – Job:

Pengembangan infrastruktur perikanan dan intensifikasi-ekstensifikasi usaha perikanan.

3. Pro – Growth:

Peningkatan daya saing industri perikanan dan iptek perikanan.

4. Pro – Sustainable:

Pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

5. Pro – Business:

Pengembangan kerjasama, kemitraan usaha, dan penataan regulasi.

Tabel 3.3
Target Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perikanan Kota Kendari
Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja (Tujuan dan Sasaran) | Target 2023 |
|----------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tercapainya Target Produksi Perikanan (Ton) | 37.500 |
| | Perikanan Tangkap (Ton) | 35.000 |
| | Perikanan Budidaya (Ton) | 2.5000 |
| 2 | Jumlah Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun) | 55 |
| 3 | Cakupan Binaan Kelompok Nelayan (%) | 15 |
| 4 | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton) | 22.500 |

Berdasarkan Tabel 3.3, Dinas Perikanan Kota Kendari memiliki 4 Indikator Kinerja dengan pertimbangan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kota Kendari serta jumlah program dan kegiatan yang diakomodir pada tahun anggaran 2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan berisikan kegiatan prioritas, indikator keluaran program dan pendanaan indikatif untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan SKPD Dinas Perikanan Kota Kendari. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.4.



Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.25 | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | Kota Kendari | 1 Tahun | 36.322.220.000 | APBD | | 1 Tahun | 21.692.640.000 |
| 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah | | 1 Tahun | 8.634.920.000 | | | 1 Tahun | 7.800.740.000 |
| 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja OPD | | 24 11 Dokumen dan 13 Laporan Kegiatan | 11.760.000 | | | 23 10 Dokumen dan 13 Laporan Kegiatan | 92.260.000 |
| 3.25.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 6 Dokumen | 41.000.000 | | | 5 Dokumen | 21.000.000 |
| 3.25.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil | | 3 2 Laporan Kegiatan | 10.340.000 | | | 3 2 Laporan Kegiatan | 10.340.000 |



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|----------|--|----------------------|--|--|--|----------------------|
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen | | dan 1 Dokumen | | | | dan 1 Dokumen | |
| 3.25.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen RKA-P | 5.880.000 | | | 3 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen RKA-P | 5.880.000 |
| 3.25.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | 4 | 3 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen | 11.840.000 | | | 4 3 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen | 11.840.000 |
| 3.25.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 | 3 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen DPA-P | 11.340.000 | | | 4 3 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen DPA-P | 11.340.000 |
| 3.25.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 | 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen LAKIP | 11.840.000 | | | 3 2 Laporan Kegiatan dan 1 Dokumen LAKIP | 11.840.000 |
| 3.25.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Laporan | 19.520.000 | | | 1 Laporan | 20.020.000 |
| 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Tahun | 5.743.080.000 | | | 1 Tahun | 5.843.400.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|----|--------------------------------|-------------------|--|--|----|--------------------------------|-------------------|
| 3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | 1 | Tahun | 5.700.000.000 | | | 1 | Tahun | 5.800.000 |
| 3.25.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | 3 | Dokumen | 22.240.000 | | | 3 | Dokumen | 22.240.000 |
| 3.25.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 2 | Laporan Kegiatan | 7.840.000 | | | 2 | Laporan Kegiatan | 8.000.000 |
| 3.25.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | 13 | Laporan | 13.000.000 | | | 13 | Laporan | 13.000.000 |
| 3.25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 4 | 2 Dokumen dan 2 Laporan | 18.560.000 | | | 4 | 2 Dokumen dan 2 Laporan | 18.560.000 |
| 3.25.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | 1 | Dokumen | 5.000.000 | | | 1 | Dokumen | 5.000.000 |
| 3.25.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | 1 | Dokumen | 7.680.000 | | | 1 | Dokumen | 7.680.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|----------|--------------|--------------------|--|--|----------|--------------|--------------------|
| 3.25.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | 2 | Laporan | 5.880.000 | | | 2 | Laporan | 5.880.000 |
| 3.25.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | 1 | Tahun | 25.500.000 | | | 1 | Tahun | 25.500.000 |
| 3.25.01.2.04.01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | | 1 | Dokumen | 6.000.000 | | | 1 | Dokumen | 6.000.000 |
| 3.25.01.2.04.02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | | 1 | Dokumen | 6.000.000 | | | 1 | Dokumen | 6.000.000 |
| 3.25.01.2.04.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | 1 | Laporan | 7.500.000 | | | 1 | Laporan | 7.500.000 |
| 3.25.01.2.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | 12 | Laporan | 6.000.000 | | | 12 | Laporan | 6.000.000 |
| 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 1 | Tahun | 467.000.000 | | | 1 | Tahun | 323.000.000 |
| 3.25.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | 1 | Unit | 6.000.000 | | | 1 | Unit | 6.000.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------|--------------|--------------------|--|--|----------|--------------|--------------------|
| 3.25.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | 54 | Paket | 35.000.000 | | | 79 | Paket | 35.000.000 |
| 3.25.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | 2 | Dokumen | 14.000.000 | | | 2 | Dokumen | 14.000.000 |
| 3.25.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | 4 | Orang | 220.000.000 | | | 3 | Orang | 100.000.000 |
| 3.25.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | 54 | Orang | 24.000.000 | | | 0 | Orang | 0 |
| 3.25.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 11 | Orang | 165.000.000 | | | 11 | Orang | 165.000.000 |
| 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 1 | Tahun | 425.000.000 | | | 1 | Tahun | 437.000.000 |
| 3.25.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 3 | Paket | 16.000.000 | | | 3 | Paket | 19.000.000 |
| 3.25.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 1 | Paket | 5.000.000 | | | 1 | Paket | 6.000.000 |
| 3.25.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | | 1 | Paket | 5.000.000 | | | 1 | Paket | 5.000.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|-----------|-------------|----------------------|--|--|-----------|-------------|--------------------|
| 3.25.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | 1 | Paket | 20.000.000 | | | 1 | Paket | 22.000.000 |
| 3.25.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | | 1 | Paket | 15.000.000 | | | 1 | Paket | 15.000.000 |
| 3.25.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | 1 | Paket | 8.000.000 | | | 1 | Paket | 8.000.000 |
| 3.25.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | | 1 | Paket | 15.000.000 | | | 1 | Paket | 15.000.000 |
| 3.25.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 4 | Laporan | 8.000.000 | | | 4 | Laporan | 8.000.000 |
| 3.25.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 74 | Laporan | 330.000.000 | | | 76 | Laporan | 336.000.000 |
| 3.25.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | 1 | Dokumen | 3.000.000 | | | 1 | Dokumen | 3.000.000 |
| 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 17 | Unit | 1.370.000.000 | | | 73 | Unit | 663.000.000 |
| 3.25.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 6 | Unit | 870.000.000 | | | 5 | Unit | 420.000.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----------|----------------|-------------------|--|--|-----------|----------------|-------------------|
| 3.25.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | 1 | Unit | 400.000.000 | | | 0 | Unit | 0 |
| 3.25.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | | 2 | Unit | 16.000.000 | | | 31 | Unit | 86.000.000 |
| 3.25.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | | 6 | Unit | 68.000.000 | | | 4 | Unit | 53.000.000 |
| 3.25.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 2 | Unit | 16.000.000 | | | 32 | Unit | 44.000.000 |
| 3.25.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 0 | Unit | 0 | | | 1 | Unit | 60.000.000 |
| 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 10 | Laporan | 41.550.000 | | | 10 | Laporan | 41.550.000 |
| 3.25.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 1 | Laporan | 4.000.000 | | | 1 | Laporan | 4.000.000 |
| 3.25.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 4 | Laporan | 33.550.000 | | | 4 | Laporan | 33.550.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|-----------|-------------|--------------------|--|--|-----------|-------------|--------------------|
| 3.25.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 5 | Laporan | 97.800.000 | | | 5 | Laporan | 97.800.000 |
| 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Aset/Barang Milik Daerah | | 71 | Unit | 432.470.000 | | | 73 | Unit | 356.470.000 |
| 3.25.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 31 | Unit | 300.470.000 | | | 31 | Unit | 302.470.000 |
| 3.25.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 23 | Unit | 9.000.000 | | | 23 | Unit | 9.000.000 |
| 3.25.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 3 | Unit | 99.000.000 | | | 3 | Unit | 21.000.000 |
| 3.25.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 13 | Unit | 18.000.000 | | | 15 | Unit | 18.000.000 |
| 3.25.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 1 | Unit | 6.000.000 | | | 1 | Unit | 6.000.000 |



| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|-------------------|----------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Tercapainya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | | 35.000 Ton | 8.856.800.000 | | | 38.500 Ton | 6.331.050.000 |
| 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | | 11,37 % | 8.600.000.000 | | | 19,43 % | 6.150.000.000 |
| 3.25.03.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota | | 2 Dokumen | 10.000.000 | | | 0 Dokumen | 0 |
| 3.25.03.2.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | 1.769 Unit | 8.590.000.000 | | | 1.769 Unit | 6.150.000.000 |
| 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Cakupan Binaan kelompok Nelayan | | 7 % | 222.000.000 | | | 8 % | 146.250.000 |
| 3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil | | 206 Orang | 180.000.000 | | | 211 Orang | 134.250.000 |
| 3.25.03.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | 12 Kelompok | 30.000.000 | | | 0 Kelompok | 0 |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-------|------------|---------------|--|--|-------|------------|---------------|
| 3.25.03.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha | | 10 | Unit Usaha | 12.000.000 | | | 10 | Unit Usaha | 12.000.000 |
| 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | 2 | Layanan | 34.800.000 | | | 2 | Layanan | 34.800.000 |
| 3.25.03.2.03.02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | 2 | Layanan | 34.800.000 | | | 2 | Layanan | 34.800.000 |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Tercapainya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | | 2.500 | Ton | 6.370.000.000 | | | 2.780 | Ton | 5.950.250.000 |
| 3.25.04.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Perizinan Bidang Perikanan Budidaya | | 1 | Tahun | 438.000.000 | | | 1 | Tahun | 363.000.000 |
| 3.25.04.2.01.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan | | 1 | SOP | 6.000.000 | | | 0 | SOP | 0 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|----|------------------|--------------------|--|----|------------------|--------------------|
| | | Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | | | | | |
| 3.25.04.2.01.02 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis | | 5 | Izin/Rekomendasi | 4.000.000 | | 5 | Izin/Rekomendasi | 4.000.000 |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | 42 | Kelompok | 156.000.000 | | 42 | Kelompok | 131.000.000 |
| 3.25.04.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | 27 | Kelompok | 135.000.000 | | 27 | Kelompok | 110.000.000 |
| 3.25.04.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | 5 | Kelompok | 4.000.000 | | 5 | Kelompok | 4.000.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|----------|--------------|----------------------|--|--|----------|--------------|----------------------|
| 3.25.04.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | 5 | Kelompok | 12.000.000 | | | 5 | Kelompok | 12.000.000 |
| 3.25.04.2.02.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | 5 | Kelompok | 5.000.000 | | | 5 | Kelompok | 5.000.000 |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Meningkatnya Produksi Hasil Budidaya Perikanan | | 1 | Tahun | 5.776.000.000 | | | 1 | Tahun | 5.456.250.000 |
| 3.25.04.2.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 1 | Dokumen | 5.000.000 | | | 1 | Dokumen | 5.250.000 |
| 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 17 | Unit | 1.400.000.000 | | | 17 | Unit | 1.400.000.000 |
| 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 10 | Unit | 500.000.000 | | | 10 | Unit | 500.000.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|----|-------------|---------------|--|--|----|-------------|---------------|
| 3.25.04.2.04.04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | | 3 | Sampel | 6.000.000 | | | 3 | Sampel | 6.000.000 |
| 3.25.04.2.04.05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat | | 20 | Orang | 15.000.000 | | | 20 | Orang | 20.000.000 |
| 3.25.04.2.04.06 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | | 1 | Ha | 3.850.000.000 | | | 1 | Ha | 3.525.000.000 |
| 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah Jenis Usaha Bidang Perikanan yang Diawasi | | 3 | Jenis Usaha | 26.000.000 | | | 3 | Jenis Usaha | 26.000.000 |
| 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Kabupaten/Kota | | 4 | Dokumen | 26.000.000 | | | 4 | Dokumen | 26.000.000 |
| 3.25.05.2.01.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | 2 | Dokumen | 14.000.000 | | | 2 | Dokumen | 14.000.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|----|------------|----------------|--|--|----|------------|---------------|
| 3.25.05.2.01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota | | 2 | Dokumen | 12.000.000 | | | 2 | Dokumen | 12.000.000 |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Jumlah Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Pembinaan dan Fasilitas | | 5 | % | 12.434.500.000 | | | 5 | % | 1.584.600.000 |
| 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Tersedianya Dukumen Daftar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | 1 | Dokumen | 9.500.000 | | | 1 | Dokumen | 9.600.000 |
| 3.25.06.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | 1 | Dokumen | 9.500.000 | | | 1 | Dokumen | 9.600.000 |
| 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Meningkatnya Daya Saing Produk Hasil usaha Pengolahan dan Usaha Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | 10 | Unit Usaha | 10.000.000 | | | 10 | Unit Usaha | 10.000.000 |
| 3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Terbinanya Pelaku Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | 10 | Unit Usaha | 10.000.000 | | | 10 | Unit Usaha | 10.000.000 |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----|--------------|----------------|--|--|-----|--------------|---------------|
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya serta Tersalurkannya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan guna Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat | | 52 | % | 12.415.000.000 | | | 53 | % | 1.565.000.000 |
| 3.25.06.2.03.01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 500 | Ton | 12.375.000.000 | | | 500 | Ton | 1.525.000.000 |
| 3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 7 | Pelaku Usaha | 40.000.000 | | | 7 | Pelaku Usaha | 40.000.000 |



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta sumber pendanaan indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian RENSTRA Dinas Perikanan Kota Kendari tahun 2023-2026. Sumber pendanaan indikatif Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Kendari bersumber dari APBD. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023 terdiri atas 5 Program dan 19 Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Kendari disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Kendari
Tahun Anggaran 2023

| No | Program | No | Kegiatan |
|----|---|----|---|
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| | | 4 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan |
| | | 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan |
| B | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 10 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | 11 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota |
| | | 12 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan |
| C | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 13 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | 14 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil |
| | | 15 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |
| D | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 16 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota |
| E | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 17 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil |
| | | 18 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |
| | | 19 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota |



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2023 ini adalah usulan rencana kinerja dalam rangka fasilitasi pembangunan perikanan Kota Kendari tahun 2023 berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Kota Kendari 2023 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintahan Kota Kendari serta target dan sasaran pembangunan perikanan secara nasional yang ditetapkan melalui SKPD Dinas Perikanan Kota Kendari.

Renja Dinas Perikanan Kota Kendari sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan perikanan yang bersumber anggaran APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 serta untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021.

Penyusunan renja telah diselaraskan dengan Kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan/kabupaten/provinsi, koordinasi sinkronisasi perencanaan dengan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, rancangan awal RKPD, usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan perikanan di Kota Kendari.

Dengan adanya Renja Dinas Perikanan Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.